

**PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2D PADA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun Oleh:

Gede Ryan Bayu Suputra

NIM: 1915613156

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

**PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2D PADA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Disusun Oleh:

Gede Ryan Bayu Suputra

NIM: 1915613156

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Gede Ryan Bayu Suputra

NIM : 1915613156

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Prosedur Pembuatan dan Penerbitan SP2D Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja

Pembimbing : 1. I Ketut Sudiarta, S.E., M.Pd.

2. I Putu Mertha Astawa, S.E., M.M.

Tanggal Uji : Senin, 8 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 8 Agustus 2022



Gede Ryan Bayu Suputra
NIM. 1915613156

**PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2D PADA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA**

GEDE RYAN BAYU SUPUTRA

NIM: 1915613156

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III

Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



(I Ketut Sudiarta, SE.,M.Pd)
NIP. 196007171988111001



(I Putu Mertha Astawa, SE, MM)
NIP. 196203171990031001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



(I Made Sudana, S.E., M.Si.)
NIP. 196112281990031001


**PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2D PADA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 8 Agustus 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:




1. I Ketut Sudiarta, S.E., M.Pd.
NIP. 196007171988111001

ANGGOTA:



2. Drs. I Deva Made Mahayana, M.Si
NIP. 196012311990031018



3. Ketut Nurhavanti, S.Pd.H., M.Pd.H
NIP. 198709282015042003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul “Prosedur Pembuatan dan Penerbitan SP2D Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Penulis menyadari Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak I Nyoman Abdi S.E., M.eCom.**, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. **Bapak I Made Sudana S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir ini
3. **Bapak I Made Bagiada S.E., M.Si., Ak**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir

4. **Bapak I Ketut Sudiarta, SE.,M.Pd**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. **Bapak I Putu Mertha Astawa, SE, MM**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Selaku ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi Politkenik Negeri Bali yang juga telah banyak memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah banyak memberikan tuntunan serta bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna hingga terselesaikannya tugas akhir ini
8. Pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singarja yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam mendukung penyusunan tugas akhir ini
9. Orang tua, saudara, teman – teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Badung, 8 Agustus 2022



Gede Ryan Bayu Suputra



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**Judul: PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2D PADA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
SINGARAJA**

**ABSTRAK
GEDE RYAN BAYU SUPUTRA**

Penelitian ini membahas mengenai hal yang menghambat proses penerbitan SP2D pada KPPN Singaraja, dengan melakukan perbandingan antara SOP Penerbitan SP2D pada KPPN Singaraja dengan PMK 190/05 Tahun 2012, dan melakukan pengecekan apakah dokumen pendukung SPM yang dikirimkan oleh Satker sudah sesuai dengan PMK 190/05 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan komparatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara SOP Penerbitan SP2D dengan PMK 190/05 Tahun 2012 pada uraian kegiatan sudah sesuai namun bagan alur yang ada pada SOP sulit untuk dipahami tanpa uraian kegiatan, sehingga penulis mengusulkan bagan alur yang lebih mudah dipahami, dan pada dokumen pendukung ada beberapa dokumen pendukung yang tidak dilampiri sehingga proses penerbitan SP2D terhambat. Dengan penelitian ini diharapkan alur penerbitan SP2D di KPPN Singaraja dapat lebih dipahami dan dokumen pendukung yang dikirimkan lengkap.

Kata Kunci: Prosedur, SP2D, Gaji Induk, Ganti Uang Persediaan, KPPN Singaraja

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

***Title: PROCEDURES FOR MAKING AND ISSUING SP2D AT THE STATE
TREASURY SERVICE OFFICE (KPPN) SINGARAJA***

**ABSTRACT
GEDE RYAN BAYU SUPUTRA**

This study discusses the things that hinder the process of issuing SP2D at KPPN Singaraja, by comparing the SOP for Issuing SP2D at KPPN Singaraja with PMK 190/05 of 2012, and checking whether the supporting documents of SPM sent by the Satker are in accordance with PMK 190/05 In 2012. The research method used in this research are descriptive qualitative and comparative with data collection techniques of interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that the compatibility between the SOP for Issuing SP2D and PMK 190/05 of 2012 in the description of activities is appropriate, but the flow chart in the SOP is difficult to understand without a description of the activities, so the author proposes a flow chart that is easier to understand, and in the document, There are several supporting documents that are not attached so that the SP2D issuance process is hampered. With this research, it's hoped that the flow of SP2D issuance at KPPN Singaraja can be better understood and the supporting documents sent are complete.

Keywords: Procedures, SP2D, Master Salary, Change Supply Money, the State Services Office of the State Treasury Singaraja



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Kantor di lingkungan Pemerintahan Pusat yang memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang disebut sebagai Satker, Satker merupakan pihak pengguna Anggaran yang memiliki hak untuk menagih pembayaran tagihan kepada pemerintah dengan mengajukan SPM atau Surat Perintah Membayar kepada KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang dimana beban tagihan yang disampaikan kepada KPPN melalui SPM tersebut disusun berdasarkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang akan dibebankan terhadap APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 190/05 Tahun 2012, SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan Dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada dasarnya SPM memiliki beberapa jenis antara lain, SPM-LS, SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP. SPM tersebut diajukan kepada KPPN selaku Bendahara Umum Negara agar beban tagihan berdasarkan SPM tersebut dapat diterbitkan dan dicairkan melalui SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang sebelumnya sudah diuji dan disahkan oleh pihak KPPN.

KPPN sendiri merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas sebagai Bendahara Umum Negara, KPPN merupakan salah satu badan keuangan pemerintahan yang bertugas untuk menyalurkan Dana dari kas negara ke satuan kerja di bawah kementerian / lembaga lain ataupun dibawah kementerian keuangan itu sendiri.

Secara struktural KPPN bekerja dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor wilayah. Secara Umum tugas KPPN sangat penting karena bertanggung jawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebaskan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara fungsi sendiri KPPN dibagi menjadi 5 Kantor, yang pertama KPPN tipe A1, KPPN tipe A2, KPPN Khusus dana pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi

KPPN Singaraja merupakan KPPN Tipe A2, KPPN tipe A2 memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN tipe A2 memiliki fungsi untuk melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Di dalam melakukan penerbitan SP2D tersebut pihak KPPN akan menerima SPM beserta dokumen pendukung yang dikirimkan oleh PPSPM

(Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) kemudian dilakukan proses pembuatan dan penerbitan dari SP2D sesuai dengan SOP, yang hasil akhirnya adalah SP2D itu sendiri.

Di dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya ada suatu kendala atau hambatan yang mengakibatkan kegiatan tersebut terhambat. Di dalam pembuatan dan penerbitan SP2D pada KPPN Singaraja tentunya ada hambatan yang mengakibatkan Penerbitan SP2D terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi nilai kinerja dari KPPN itu sendiri, di dalam pelaksanaan pembuatan dan penerbitan SP2D terdapat kesalahan uraian dan tanggal pada SPM yang dikirimkan oleh pihak satker, selain kesalahan pada isian SPM, dokumen pendukung yang dilampirkan pada SPM tidak lengkap.

Berdasarkan paparan materi diatas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui mengenai “Prosedur Pembuatan dan Penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah, rumusan masalahnya adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah Prosedur Pembuatan dan Penerbitan SP2D Gaji Induk dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada KPPN Singaraja?
- 1.2.2 Apakah kelengkapan dokumen SP2D pada KPPN sesuai dengan PMK 190/05 Tahun 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Prosedur Pembuatan dan penerbitan SP2D Gaji Induk dan Ganti Uang Persediaan (GUP) pada KPPN Singaraja.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian kelengkapan dokumen SP2D pada KPPN Singaraja dengan PMK 190/05 Tahun 2012

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dilakukan guna untuk menerapkan teori atau mempraktekan ilmu yang didapatkan selama mengemban pendidikan di Politeknik Negeri Bali apakah berbeda antara teori yang diberikan dengan yang terjadi di perusahaan serta meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep yang diteliti yang dapat dimanfaatkan di masa yang Akan datang.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan mengevaluasi sejauh mana system pendidikan yang telah dijalankan, dan diharapkan dari hasil penilitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna kemajuan kurikulum khususnya di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali sehingga

terdapat kesesuaian antara materi pendidikan yang diberi dengan kenyataan yang ada.

1.4.3 Bagi KPPN Singaraja

Dengan adanya penelitian dapat memberikan manfaat agar dapat digunakan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi KPPN Singaraja

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada 2 Jenis SPM yang paling banyak diterima dari Bulan Januari sampai April 2022, yaitu SPM Gaji Induk dan SPM Ganti Uang Persediaan, yang nantinya akan dilakukan penerbitan SP2D sesuai dengan SOP yang berlaku



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan mengenai Prosedur Pembuatan dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Pada evaluasi sistem pengendalian internal pada KPPN Singaraja, dari keempat unsur sistem pengendalian internal menurut mulyadi, pihak KPPN sudah melakukan pengendalian internal terhadap pembuatan SP2D Gaji Induk dan SP2D Ganti Uang Persediaan secara baik, dimana dari keempat unsur pengendalian internal tersebut, pihak KPPN sudah memenuhi keempat unsur tersebut, sehingga risiko – risiko yang dapat terjadi mampu terminimalisir, sehingga pembuatan SP2D pada KPPN Singaraja berjalan dengan baik.
- 5.1.2 Pada Evaluasi SOP Penerbitan SP2D pada KPPN Singaraja sudah baik dimana SOP Penerbitan SP2D pada KPPN sudah mengikuti PMK 190/05 Tahun 2012 namun alur bagan yang ada di dalam SOP Penerbitan SP2D pada KPPN Singaraja belum bisa menggambarkan secara terperinci alur dari uraian kegiatan yang ada pada SOP.
- 5.1.3 Pada bagian pencocokan dokumen pendukung SPM untuk Penerbitan SP2D yang diterima oleh pihak KPPN Singaraja dari Satker dengan PMK 190/05 Tahun 2012 terdapat kekurangan, yaitu pada SPM yang akan diterbitkan SP2D Gaji Induk. Terdapat tiga dokumen pendukung

yang belum dilampirkan di dalam SPM sehingga proses penerbitan SP2D terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan Simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan kepada pihak KPPN Singaraja dan pihak satker adalah sebagai berikut:

5.2.1 KPPN

Pihak KPPN Singaraja selaku Bendahara Umum Negara dapat menjaga kinerja perusahaan dengan baik kedepannya dengan menjaga nilai – nilai pengendalian internal yang ada dan menjalankan prosedur penerbitan SP2D sesuai PMK 190/05 Tahun 2012, pihak KPPN juga diharapkan mampu memonitoring pihak satker dengan lebih baik sehingga tidak ada lagi penolakan SPM.

5.2.2 Satker

Untuk pihak satker diharapkan mengisi form Chips 1,3,2 dengan baik yang dimana ini merupakan inovasi dari KPPN Singaraja sebagai saran untuk mengurangi SPM dengan dokumen pendukung yang kurang sehingga proses pencairan dana dapat dilaksanakan tepat waktu, selain mengisi Chips 1,3,2 pihak satker dalam mengumpulkan SPM bisa menggunakan form kendali sebagai alat pembantu agar tidak ada dokumen pendukung yang tidak terlampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hunta, A. T. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 1245-1256.
- KBBI. (2022, Mei 20). *Arti Kata Prosedur pada Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/prosedur>
- Kuangan, M. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia .
- Kuangan, M. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kuangan, M. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novita, C. (2021, Maret 12). Pengertian dan Contoh Data Kuantitatif Serta Cara Mendapatkannya. p. 1.
- Respatina, L. S. (2019). *Sistem dan Prosedur Perencanaan, Penganggaran Da Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bagian Perbendaharaan BPKAD Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Sandi, F. B. (2021, Desember 22). *SP2D: Mengenal Surat Perintah Pencairan Dana & Keunggulannya* . Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/sp2d>
- Sari, Y. (2017). *LOGIKA ALGORITMA PSUEDOCODE, Flowchart, dan C++*. Jakarta: Perahu Litera.
- Singaraja, K. (2022, January 1). *KPPN Singaraja*. Retrieved from KPPN Singaraja Website: <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja/id/profil/sejarah.html>
- Wijaya, D. d. (2018). Pengertian Prosedur. *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat*, 26-27.